BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pengaturan urusan daerah didasarkan kepada asas otonomi daerah (*desentralisasi*) dan tugas pembantuan yang diarahkan pada peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Selain itu, daerah memiliki kewenangan yang penuh untuk menentukan sendiri langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakatnya.

Desentralisasi yang dilakukan terfokus pada tingkat kabupaten dan kota. Salah satu tujuannya adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, mengetahui dan mengenal bagaimana keadaan masyarakatnya dan juga untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten atau kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai sumberdaya yang dimiliki serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah dari pada pemerintah pusat.[1]

Potensi besar sumber daya manusia dan sumber daya alam ternyata tidak dapat menjamin tercapainya kesejahteraan rakyat dan mengingkat martabat bangsa yang dewasa ini semakin terpuruk di mata dunia. Seharusnya ada upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ke depan untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang seperti ini. Untuk itu, pemerintah tidak hanya terfokus kepada pembuatan-pembuatan kebijakan yang hanya mementingkan golongan tertentu saja tetapi harus mengikutsertakan masyarakat dalam membangun kembali integritas bangsa. Dalam hal ini, masyarakat itu sendiri harus memiliki kekuatan dan kemandirian, dan

---

[1] Mudjarad Kuncoro. 2004. *"Otonomi dan Pembangunan Daerah"*. Erlangga: Jakarta. hlm. 25.

inilah yang dikatakan dengan pemberdayaan yang berorientasi kepada individu atau masyarakat sosial.[2]

Isu pemberdayaan (*empowerment*) dianggap merupakan jalan keluar yang tepat untuk merekonstruksi pembangunan masyarakat dewasa ini. Walaupun program- program pemberdayaan terhadap individu dan masyarakat secara umum telah berlangsung, seperti dilakukan penyuluhan kepada masyarakat, tetapi hasil nyata dari program tersebut belum cukup memuaskan. Masyarakat masih belum cukup memiliki akses yang sama terhadap sumber-sumber yang dibutuhkannya, mencakup penyaluran hasil pertanian, ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) menjadi isu utama dalam program dan orientasi pembangunan nasional dewasa ini. Mencuatnya model pembangunan yang berbasis komunitas ini tidak hanya didasarkan pada pengalaman kegagalan strategi dan kebijakan pembangunan nasional pada masa lalu, tetapi juga pengalaman negara-negara maju yang kemudian mendorong terjadinya reorientasi dan perubahan paradigma pembangunan dari ekonomi sebagai sentral (*capital centered development*) kepada manusia sebagai pusat utama pembangunan (*people centered development*).[3]

Model pembangunan yang berpusat pada modal, teknologi, mesin, dan uang menjadi instrumen pokok dalam aktivitas pembangunan, sedangkan keterlibatan manusia hanya menjangkau sebagian kecil golongan yang termasuk ke dalam kelompok pemilik modal, penguasa politik, para ahli, dan sebagian kecil kelompok manusia sebagai tenaga produksi.[4] Pada akhirnya, strategi pembangunan semacam ini menciptakan dehumanisasi[5]. Ketiadaan

---

[2] ***Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan.*** Volume 4. Nomor 1. 2008. Aris Munandar. **"**Peran negara Dalam Penguatan Program pemberdayaan masyarakat". Pasca Sarjana Universitas Nasional. Hal:156

[3] Ana Budi Rahayu. 2011. *"Pemberdayaan Masyarakat Desa Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa"*. Bina Swadaya Badan Pengembangan Swadaya Masyarakat.

[4] ***Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan.*** Volume 4. Nomor 1. 2008. Aris Munandar. **"**Peran negara Dalam Penguatan Program pemberdayaan masyarakat". Pasca Sarjana Universitas Nasional. Hal:152

[5] Dehumanisasi yang dimaksudkan adalah manusia yang kehilangan jiwa, inisiatif, pasif, dan tidak berdaya *(powerless)*

akses terhadap sumber-sumber tersebut menyebabkan masyarakat umum tidak dapat menikmati berbagai macam kesempatan seperti ekonomi (pekerjaan), politik, pendidikan, pelayanan sosial dan pelayanan publik lainnya.

Model pembangunan yang berpusat pada manusia menempatkan manusia sebagai objek dan tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam model ini, pembangunan dianggap lebih dari sekedar hasil ekonomi yang tumbuh dengan sederhana dan tidak terbagi-bagi. Korten mendefinisikan pembangunan berpusat kepada manusia. Pembangunan adalah proses dari anggota-anggota suatu masyarakat yang meningkatkan kapasitas perorangan dan *institusional* mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka.[6]

Dibalik itu semua, permasalahan yang paling mendesak untuk dicari pemecahannya saat ini adalah masalah kemiskinan. Mengingat permasalahan kemiskinan ini terkait hubungannya dengan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Terungkap dari kajian terbaru dari Bank Dunia yang menyimpulkan bahwa kemiskinan di Indonesia bukan sekadar 10-20% penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut *(extreme poverty)*. Tapi ada kenyataan lain yang membuktikan bahwa kurang lebih tiga per lima atau 60% penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan.[7]

Kondisi di atas jelas memprihatinkan mengingat realita kemiskinan di atas jelas bukanlah permasalahan yang mudah diatasi karna kondisi kemiskinan yang harus ditanggulangi mencakup banyak segi. Pemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang terbatas dan ketidaksamaan kesempatan dalam menghasilkan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan tidak merata. Ini semua pada gilirannya

---

[6] Achmad Mulyana. 2005. "*Organisasi sosial dalam pemberdayaan masyarakat*." Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI: Jakarta. hlm. 53

[7] Gunawan Sumodiningrat, Judul: *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.* http://suniscome.50webs.com/data/download/008%20Strategi%20Pemberdayaan.pdf diakses tanggal 1 Febuari 2012. Waktu: 11.15 WIB.

menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan selanjutnya menimbulkan struktur masyarakat yang timpang.

Secara umum permasalahan kemiskinan dan ketidakberdayaan disebabkan oleh dua faktor utama yang saling mengkait satu sama lain, yaitu : Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut permasalahan dan kendala yang berasal dari dalam individu atau masyarakat miskin yang bersangkutan, seperti : rendahnya motivasi, minimnya modal, lemahnya penguasaan aspek manajemen dan teknologi. Sementara faktor eksternal penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan adalah belum kondusifnya aspek kelembagaan yang ada.[8]

Berpijak pada logika penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat itu, maka strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan harus menyentuh permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, baik pada sisi internal maupun eksternal.[9] Para pelaku pembangunan dituntut untuk secara konsisten dan berkesinambungan menciptakan dan membina kebersamaan sehingga dampaknya bukan hanya pada pemberdayaan posisi masyarakat lapisan bawah namun lebih pada penguatan sendi-sendi perekonomian negara secara keseluruhan.

Upaya pemerintah diharapkan akan mengubah model dan orientasi program-program pembangunan dari yang mengandalkan kekuatan ekonomi dan peran sentral para pemilik modal ke arah model pembangunan yang berbasis kerakyatan (pemberdayaan masyarakat). Namun, perubahan orientasi tersebut bukan berarti dapat berjalan dengan sendirinya. Untuk mengaktualisasikan perubahan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan suatu kondisi yang berpihak pada kepentingan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana dikemukakan Paiva, ada empat aspek penting yang diperlukan untuk mendukung tercapainya upaya pemberdayaan masyarakat,[10] yaitu perubahan struktural,

---

[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.*
[10] ***Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan.*** Volume 4. Nomor 1. 2008. Aris Munandar. **"**Peran negara Dalam Penguatan Program pemberdayaan masyarakat". Pasca Sarjana Universitas Nasional. Hal:153

pengintegrasian sosial ekonomi, pengembangan kelembagaan, dan pembaharuan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan individu tidak akan sempurna tanpa disertai dengan perubahan keempat aspek tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Maka, keluarlah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 460-109-2010 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Barat. Hal ini, bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menjalani kehidupan, dan untuk itu, perlu dilihat perbandingan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatra Barat per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1.
Jumlah Persentase Penduduk Miskin di Sumatra Barat per Kabupaten/Kota Tahun 2010

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Miskin (KK)	Jumlah Anggota Rumah Tangga Miskin (Jiwa)
1	Kabupaten Agam	3,417	1 01,841
2	Kabupaten Dharmasraya	8 ,421	3 2,032
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 3,858	6 0,160
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	2 0,952	7 9,898
5	Kabupaten Padang Pariaman	2 4,683	1 18,490
6	Kabupaten Pasaman	2 5,978	1 11,275
7	Kabupaten Pasaman Barat	3 2,102	1 33,386
8	Kabupaten Pesisir Selatan	4 1,414	1 82,123
9	Kabupaten Sawahlunto	2,921	5 2,702
10	Kabupaten Solok	2 5,089	1 10,931
11	Kabupaten Solok Selatan	9 ,508	3 8,807
12	Kabupaten Tanah Datar	1 8,229	7 4,115
13	Kota Bukittinggi	4 ,092	1 8,126
14	Kota Padang	3 8,099	85,001
15	Kota Padang Panjang	9 48	4 ,336
16	Kota Pariaman	2 ,998	1 6,252
17	Kota Payakumbuh	5 ,217	2 1,978
18	Kota Sawahlunto	2 ,290	9 ,003
19	Kota Solok	2 ,424	1 0,825

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatra Barat tahun 2010

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa provinsi sumaterabarat masih memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar pada beberapa kabupaten untuk tahun 2010. Untuk itu perlu dilakukan maksimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Agar permasalahan ini dapat di dapat diatasi sedini mungkin.

Berpedoman pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2009, salah satu upaya pemberdayaan masyarakat miskin adalah pemberian bantuan Kredit Mikro Nagari. Kredit Mikro Nagari disalurkan Pemprov Sumbar dengan syarat adanya dana pendamping dari pemerintah kabupaten/kota.[11] Kredit ini ditujukan bagi kelompok usaha ekonomi kecil yang dikelola masyarakat miskin, sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di daerah ini.

Selain kelompok usaha tersebut, kredit ini juga ditujukan bagi pelaku usaha secara individu. Kelompok dan individu usaha yang masuk dalam program Kredit Mikro Nagari ditetapkan berdasarkan potensi dan musyawarah dilakukan di setiap nagari. Namun gejala yang terjadi di tingkat provinsi, Badan anggaran DPRD Sumatra Barat meminta Pemerintah Provinsi Sumbar meninjau ulang program kredit mikro nagari, karena adanya pemerintah kabupaten/kota yang tidak menyediakan dana pendamping program ini. Sikap pemerintah kabupaten/kota tersebut telah menyebabkan realisasi kredit mikro nagari tidak optimal.[12]

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk institusi pemerintahan di tingkat Kabupaten yang memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang. Oleh sebab itu, di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya. Dalam usaha peningkatan kesejahteraan dengan upaya memandirikan masyarakat

---

[11] Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatra Barat. 2009. *"Petunjuk Teknis Kredit Mokro Nagari Tahun 2009".* Pemerintah Provinsi Sumatra Barat: Padang.
[12] ibid

pemerintah daerah membentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari (BPMPN) Kabupaten Lima Puluh Kota. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari. BPMPN dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN) juga ikut dalam pembangunan infrastruktur guna mendukung kegiatan masyarakat. Tidak hanya itu, program kerja lainnya dalam bentuk usaha ekonomi mikro dan bantuan sosial lainya kepada masyarakat. Berikut ini adalah tabel program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari (BPMPN) tahun 2009-2011.

Tabel 1.2
Program Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009-2011

NO	PROGAM UTAMA	PROGRAM KERJA
1.	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	a. Program pengendalian terpadu penanggulangan kemiskinan a) Menunjang program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) b) Pemanfaatan sarjana ke Nagari c) Penyiapan lembaga pusat pengendalian kemiskinan di tingkat nagari d) Penanggulangan kemiskinan pada Nagaritertinggal

		e) Koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam menunjang program pengembangan wilayah tertinggal (PWT) b. Program pemenuhan hak atas pangan a) Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat nagari c. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin a) Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga b) Pembinaan dan Revitalisasi Posyandu c) Koordinasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan penyakit menular d. Program pemenuhan hak atas layanan pendidikan a) Fasilitasi dan koordinasi program makan tambahan anak sekolah (AMT-AS) b) Pemberdayaan usaha ekonomi kelompok PKK e. Program peningkatan dan perlindungan terhadap keluarga miskin a) Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil menengah pedesaan b) Termonitorinya dan terevaluasinya penyaluran Kredit Mikro Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk 79 Nagari c. Program penyempurnaan data base kemiskinan
2.	Pemberdayaan Masyarakat Nagari	a. Program penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat a) Permasyarakatan dan kerjasama Teknologi Tepat Guna (TTG) di pedesaan b) Pembinaan dan revitalisasi posyandu c) Koordinasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan penyakit menular d) Pemetaan dan penguatan kelembagaan (TTG) di pedesaan e) Pemberdayaan usaha ekonomi kelompok (UP2K) f) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan nagari g) Fasilitasi pendataan profil Nagari h) Pemberdayaan dan Revitalisasi pasar Nagari

		b. Program peningkatan dan pengelolaan keuangan nagari a) Memfasilitasi penyusunan peraturan Nagariyang berkaitan dengan keuangan dan aset negara b) Memfasilitasi penyediaan pedoman tentang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Nagaridan pengelolaan keuangan nagari c) Pelatihan tenaga teknis Rancangan Anggaran Pendapatan Nagaridan pengelolaan keuangan nagari d) Peningkatan dan memfasilitasi lembaga pengelola keuangan Nagari c. Program pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya a) Memantapkan nilai-nilai budaya dan penguatan lembaga adat b) Peningkatan peran aktif pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di Nagari melalui Revitalisasi c) Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, khusus bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung yakni kelompok masyarakat adat terpencil, serta para penyandang kesehatan sosial (manusia lanjut usia, penderita HIV/AIDS dll.
3.	Program penataan aset nagari	a. Program peningkatan keterpaduan pengelolaan pembangunan b. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan nagari c. Terlaksananya pembinaan Bulan Bakti Gotong-royong d. Terlaksananya penataan profil Nagari e. Terlaksananya mentoring dan pelaporan dikegiatan pemberdayaan masyarakat

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009-2011

Uraian program-program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari (BPMPN) tersebut, merupakan bentuk dari pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari (BPMPN). Maka akan dapat dilihat bagaimana peran BPMPN dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai

unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari.

Pelaksanaan suatu program kegiatan tidak akan terlaksana secara optimal tanpa ada pendanaan yang cukup. Sehingga hal ini menjadi penting untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada setiap instansi. Oleh karena itu, perlu ada pendanaan untuk realisasi kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari (BPMPN). Maka dapat dilihat dari pendanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat melalui tabel 1.3 :

Tabel 1.3
Program dan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lima Puluh Kota
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja RPJM (tahun 2009)	Kondisi Kinerja RPJM (tahun 2010)	Target Pencapaian Kinerja Program Pendanaan (tahun 2011)
1	Program Pelayanan Jasa Administrasi	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	96.241.000	156.500.000	280.112.500
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	36.050.000	49.213.000	87.452.000
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	2.500.000	5.037.000	9.500.000
4	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	-	-	5.000.000
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan ikhtisar keuangan	Tersedianya laporan kinerja BPMPN	1.424.000	1.850.000	2.500.000

6	peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Tersedia dan terfasilitasinya pelayanan posyantekdes serta mahasiswa KKN di Babupaten Lima Puluh Kota	78.094.000	121.054.000	196.205.000
7	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya UKM, Bumdes dan BBGRM (lembaga ekonomi perdesaan)	185.000.000	270.145.000	428.612.000
8	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tercapainya keterpaduan program pemberdayaan masyarakat	169.108.000	285.250.000	631.133.500
9	Program peningkatan kapasitas aparatur desa	Meningkatnya wawasan aparatur Nagaridisegala bidang	96.820.000	145.080.000	264.825.000
	Jumlah		665.237.000	1.034.129.000	1.905.349.000

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2009-2011

Terlihat dari tabel 1.3 bahwa alokasi dana oleh pemerintah daerah untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN) setiap tahunnya selalu meningkat. Tetapi ternyata, meningkatnya jumlah dana yang dialokasikan tersebut tidak menjamin tercapainya tujuan dari suatu program. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN) dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan perolehan data, ternyata jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota belum menunjukkan adanya pengurangan yang besar. Ini dapat dilihat pada tabel 1.4:

Tabel 1.4.
Jumlah Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008-2010

No	Tahun	% Kemiskinan
1	2008	11.01
2	2009	9.96
3	2010	8.21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2008-2010

Berdasarkan tabel 1.4, terlihat jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 sebesar 11,01 persen dan turun menjadi 8,21 persen pada tahun 2010. Walaupun kenaikannya mencapai 2,80 persen dalam waktu tiga tahun terakhir, namun perlu upaya untuk ditingkatkan lagi kapasitasnya guna mengatasi masalah kemiskinan.

Sesuai dengan salahsatu program utama Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Pemberdayaan Masyarakat Miskin, maka salah satu upaya penurunan tingkat kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya rumah tangga miskin melalui penyediaan Kredit Mikro Nagari.[13]

Pengertian pemberdayaan dalam konteks ini adalah memberikan bantuan modal usaha tetapi diiringi dengan pertanggungjawaban produksi melalui proses perilaku positif (jujur, produktif, kerja keras, bertanggung jawab dan memahami arti kerjasama usaha). Para ahli berpendapat bahwa kunci akar kemiskinan adalah perilaku.[14] Dengan demikian, tanpa perbaikan atau perubahan perilaku orang miskin kearah yang lebih baik, maka berbagai usaha untuk membantunya akan sia-sia.

Kredit Mikro Nagari diberikan kepada kelompok keluarga miskin Nagari untuk mendukung ketersediaan modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatan, yang sekaligus meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan standar yang ada.[15] Bidang usaha yang dibantu atau difasilitasi, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sumberdaya yang ada di Nagari

Komponen yang dibantu atau difasilitasi dengan program kredit mikro nagari, adalah sebagai berikut:[16]

---

[13] Program Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009-2011

[14] Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatra Barat. 2009. *"Petunjuk Teknis Kredit Mokro Nagari Tahun 2009".* Pemerintah Provinsi Sumatra Barat: Padang. Hal 2-3

[15] *Ibid.* hal 13

[16] *Ibid.*

1. Kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin yang ada pada Nagari.
2. Kegiatan pendukung pelaksanaaan Kredit Mikro Nagari, antara lain kegiatan penyusunan perencanaan Kredit Mikro Nagari, pembinaan dan monitoring serta evaluasi penyaluran Kredit Mikro Nagari.
3. Kegiatan operasional nagari untuk menunjang pengelolaan Kredit Mikro Nagari dan kegiatan pemerintahan di tingkat Nagari
4. Kredit Mikro Nagari tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penyediaan sarana/dan prasarana dan kegiatan sosial lainnya.

Kredit Mikro Nagari adalah kredit yang diperuntukkan bagi penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis nagari melalui bantuan modal usaha. Dananya berasal dari setengah dari provinsi dan setengahnya lagi berupa dana pendamping APBD Kabupaten/Kota. Namun, Belum semua kabupaten/kota yang menganggarkan dana Kredit Mikro Nagari dalam APBD. Sejak diluncurkan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, baru lima kabupaten dan kota yang menganggarkan bantuan kredit tersebut dalam APBD mereka. Salah satu kabupaten pertama yang menganggarkan dana Kredit Mikro Nagari dalam APBD adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.[17]

Pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari ini merupakan salahsatu usaha yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN) Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tapi, masih banyak penduduk yang miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini membuktikan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupten Lima Puluh Kota belum berjalan maksimal. Sehingga, hal ini menjadi penting untuk diteliti tentang implementasi program Kredit Kredit Mikro Nagari (PKMN) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

---

[17] ibid

Hasil wawancara dengan salah satu mantan pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN) Kabupaten Lima Puluh Kota menyebutkan bahwa:

> Pelaksanaan Kredit Miko Nagari merupakan salah satu program kerja BPMPN dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin di nagari. Namun dalam pelaksanaaannya tidak seluruh Nagari yang menerima bantuan kredit mikro berhasil dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan pelaksanaan Kredit Mikro Nagari tersebut. Seperti: tidak tepat sasaran dalam dalam pemberian bantuan Kredit Mikro Nagari, pengelolaan yang tidak berjalan dengan baik, adanya penggelapan dana oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga ahkirnya beberapa Nagari dinyatakan bermasalah dalam pelaksanaan Kredit Mikro Nagari ini.[18]

Dari hasil wawancara tersebut, ternyata banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari ini. Dari 76 Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, hanya 20 Nagari yang menerima dana Kredit Mikro Nagari.[19] Tiap Nagari menerima bantuan kredit sebesar Rp. 300.000.000, dan untuk operasional pokja sebesar Rp. 7.600.000.[20] Tingkat keberhasilan yang dicapai pada tiap-tiap nagari dalam pelaksanaan program ini tidaklah sama.

Untuk penerimaan KMN pertama di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 16 lokasi, salah satunya adalah Nagari Andaleh. Nagari Andaleh merupakan Nagari yang tingkat kemacetannya cukup tinggi dibandingkan Nagari penerima Kredit Mikro Nagari lainnya.[21] Sehingga hal ini perlu diperhatikan kembali oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan implementasi kebijakan Karena hingga tahun 2012 program Kredit Mikro Nadari di Andaleh belum ada terlihat perbaikannya.

Sebagai contoh adalah kasus Nagari Andaleh yang merupakan salah satu nagari yang menerima bantuan dana Kredit Mikro Nagari. Dari 300 juta dana yang di alokasikan hanya 100

---

[18] Wawancara dengan mantan pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN) Kabupaten Lima Puluh Kota bidang pelaksanaan Kredit Mikro Nagari (*tidak bersedia disebutkan namanya)*.
[19] Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 253 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi Dana Kredit Mikro Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009.
[20] ibid
[21] Dukomentasi Badan Pemberdayaan Masyarakat pemerintahan Nagari

juta dana yang beredar di masyarakat. sedangkan 200 juta lainnya raib sebelum digunakan.[22] Hal ini seharusnya tidak terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, untuk itu perlu terlaksananya program Kredit Mikro Nagari sesuai dengan tujuan pelaksanaan kebijakannya.

Berbeda halnya dengan Nagari Situjuah Banda Dalam adalah salah satu Nagari di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. Yang merupakan Nagari berprestasi dan dapat dikatakan sukses dalam pelaksanaan Kredit Mikro Nagari. Dari 20 Nagari yang menerima Kredit Mikro Nagari pada tahun 2009, Nagari Situjuah Banda Dalam merupakan Nagari berprestasi dalam pelaksanaannya.[23] Nagari Situjuah Banda Dalam yang penduduknya berjumlah 4.366 jiwa dan 1158 KK (Kepala Keluarga) yang dijamin kesehatannya oleh Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) adalah 1.149 jiwa, Jamkesda 288 jiwa, BLT/SLT (Bantuan/Subsidi Langsung Tunai) 301 KK, dan yang memperoleh beras Raskin (Beras miskin) sebanyak 250 KK.[24]

Kegiatan yang dilakukan di Nagari Situjuah Banda Dalam bertujuan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan, sosial, pendidikan dan ekonomi kepada masyarakat, bagi masyarakat yang berdomisili di Nagari Situjuah Banda Dalam diwajibkan ikut sebagai peserta, program ini bertujuan untuk secara bersama-sama menanggulangi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Kebijakan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang bertumpu pada optomalisasi fungsi Nagari masih perlu ditingkatkan. Upaya mengembangkan usaha masyarakat kabupaten Lima Puluh Kota, banyak

---

[22] Wawancara dengan mantan pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN) Kabupaten Lima Puluh Kota bidang pelaksanaan Kredit Mikro Nagari (*tidak bersedia disebutkan namanya)*.
[23] Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari (BPMPN) bidang pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari.
[24] ibid

sekali usaha-usaha rumah tangga yang menjadi mata pencarian masyarakat seperti kerajinan rotan, usaha kolam ikan di nagari andaleh, kerajianan dari bambu. Namun yang menjadi kendalanya adalah kurangnya ketersediaan modal dan proses pemasaran yang tidak mendukung. Sehingga dapat menyebabkan lumpuhnya usaha masyarakat tersebut.

Hal ini menggambarkan bahwa upaya pemberdayaaan belum dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN) tapi hanya sebahagian yang dapat menikmatinya, tidak semua kalangan masyarakat yang merasakan manfaatnya. Hal ini terlihat walaupun adanya perubahan kearah yang lebih baik, dan adanya bantuan dana Kredit Mikro Nagari melalui program kerja BPMPN namun tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota belum menunjukkan adanya peningkatan yang besar, masih bergerak secara lambat, terutama secara realita yang ditemui di lapangan masih banyak masyarakat belum mampu untuk mandiri dan selalu tergantung kepada bantuan dana pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat bagaimana implementasi Program Kredit Mikro Nagari (PKMN) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat perlunya kajian lebih khusus mengenai pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan upaya pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Program Kredit Mikro Nagari (PKMN) di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2009-2011 (Studi Nagari Situjuah Banda Dalam dan Nagari Andaleh)?”

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat ini ditujukan agar masyarakat dapat mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun secara teknis masih banyak kendala-kendala yang dihadapi selama ini dalam usaha memandirikan masyarakat Nagari

diantaranya yaitu: a). Kebijakan yang dibuat masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro sehingga masyarakat tidak dapat berperan aktif sebagai pelaku ekonomi, b). Kebijakan yang terpusat, hal ini menyebabkan tidak tersalurnya kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat itu sendiri, c). Memposisikan masyarakat sebagai objek, sehingga masyarakat hanya sebagai yang dikenakan kebijakan saja tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebelumnya. d). Cara pandang kemiskinan yang diorientasikan pada ekonomi. e). Asumsi permasalahan dan penanggulangan kemiskinan yang sering dipandang sama. f). Lemahnya koordinasi kabupaten dan provinsi.[25]

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Kredit Mikro Nagari (KMN) di Kabupaten Lima Puluh Kota 2009-2012 (Studi Nagari Situjuah Banda Dalam dan Nagari Andaleh)

1.4 . Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi masukan dan rujukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Implementasi Program Kredit Mikro Nagari (PKMN) dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten lainnya.
3. Secara sosial, hasil dari penelitian ini nantinya akan dapat meningkatkan respon positif masyarakat kepada pemerintah.

[25] Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari (BPMPN) Kabupaten Lima Puluh Kota.